

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pola *framing* berbeda-beda di antara kesepuluh berita yang diteliti. Ada yang *framing*-nya sangat kuat mendukung otoritas negara dan mendelegitimasi demonstrasi, ada juga yang jauh lebih lemah, bahkan satu berita justru berlawanan arah. Berita paling mencolok adalah yang memuat dugaan dalang George Soros, pembalikan urutan empati secara ekstrem pada aspek kerugian material dan korban jiwa, serta perbedaan pemakaian diksi antara aktivis dan demonstrasi yang dikriminalisasi dengan penggunaan kata “diduga” dan aparat yang dilindungi oleh label “oknum” pada berita-berita lain. Pola yang sama tetap muncul dengan intensitas yang lebih ringan lewat penonjolan data yang tidak proporsional, dehumanisasi demonstran melalui diksi, dan pembatasan tanggung jawab aparat yang dilakukan pada level individu bukan instansi.

Pada berita yang *framing* yang lemah, dukungan terhadap otoritas negara juga melemah dan lebih berpihak kepada demonstrasi. Hal ini dapat dilihat pada liputan kecaman Komnas HAM yang berbentuk *straight news* dengan isi yang kritis terhadap aparat meski tetap hanya bergantung pada satu sumber tanpa ada konfirmasi silang. Lalu artikel opini akademisi yang menjadi satu-satunya berita yang sepenuhnya berlawanan arah dengan menjustifikasi kemarahan demonstran sebagai respons wajar atas ketidakadilan struktural yang dialami.

SINDOnews.com melakukan *framing* pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 yang condong mendukung pemerintah yang berafiliasi dengan pemilik media, dengan pola *framing* yang mendelegitimasi aksi demonstrasi Agustus-September 2025. Pola ini konsisten muncul di sembilan dari sepuluh berita yang diteliti, lewat tiga strategi utama: menonjolkan cerita kriminal individual demonstran, mendelegitimasi lewat narasi dalang eksternal dan kriminalisasi aktivis, serta mendemonisasi lewat penonjolan kerugian ekonomi. Ketiga strategi ini secara sistematis mengalihkan wacana publik dari pertanyaan akuntabilitas negara menjadi soal keamanan, moralitas individu, dan kepentingan

ekonomi makro. Satu-satunya pengecualian, yaitu berita opini akademisi, justru memperkuat kesimpulan ini, bukan melemahkannya. Berita itu membuktikan bahwa SINDOnews.com sebenarnya punya kapasitas redaksional untuk menghadirkan substansi struktural secara utuh, sehingga pola pada sembilan berita lainnya jelas merupakan pilihan editorial yang konsisten, bukan sekadar keterbatasan kapasitas jurnalistik.

Teori *framing* Entman dapat menjelaskan permasalahan penelitian ini secara tuntas. Keempat elemennya, yaitu *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*, berhasil membedah bagaimana SINDOnews.com secara konsisten mendefinisikan persoalan demonstrasi bukan sebagai krisis akuntabilitas negara, melainkan sebagai soal keamanan dan moralitas individu. Penyebabnya dilekatkan pada "oknum", bukan institusi. Penilaian moralnya berat sebelah terhadap demonstran. Solusinya pun cuma bersifat internal-institusional, tanpa membuka ruang evaluasi kebijakan secara struktural. Dengan begitu, kerangka Entman bukan sekadar alat bantu deskriptif, tapi memang cukup untuk menjawab keseluruhan rumusan masalah penelitian ini tanpa perlu modifikasi lebih lanjut.

Teori *framing* Entman yang didukung oleh konsep paradigma protes McLeod dan Hertog membantu memverifikasi silang temuan Entman lewat lima indikator, yaitu ketergantungan pada sumber resmi, isolasi demonstran, bingkai kerusuhan, delegitimasi, dan demonisasi. Ini menunjukkan bahwa pola *framing* media terhadap gerakan protes bersifat terstruktur dan bisa diprediksi lintas konteks, bukan sekadar kasus per kasus, sehingga memperkaya pemahaman soal relasi media, negara, dan gerakan sosial dalam kajian ilmu politik. Sementara itu, ekonomi politik media Mosco menjelaskan mekanisme struktural di balik pola *framing* tersebut: komodifikasi, strukturisasi, dan spesialisasi dalam produksi berita ternyata bukan sekadar preferensi redaksional yang netral, melainkan berkelindan dengan struktur kepemilikan media yang berafiliasi kekuasaan. Ini memberi penjelasan kausal yang tidak bisa dijangkau lewat analisis *framing* saja. Ketiga kerangka teori ini, kalau dipakai bersamaan, memperkuat argumen bahwa relasi kekuasaan antara media, negara, dan gerakan sosial di Indonesia bekerja lewat mekanisme tekstual dan struktural yang saling menguatkan.

5.2.Saran

5.2.1. Saran Praktis

1. Bagi korporasi media terutama SINDOnews.com, redaksi perlu membangun pembatas antara kepentingan ekonomi-politik dengan kebijakan editorial. Prinsip *cover both sides* dan keberimbangan narasumber perlu dijalankan dengan baik guna menjaga kenetralan informasi dan kredibilitas media di mata publik.
2. Bagi pemegang kebijakan (Dewan Pers), perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur pembatasan kepemilikan media oleh aktor politik aktif. Pemerintah dan lembaga terkait didorong untuk merumuskan aturan yang mewajibkan media memberikan *disclaimer* atau pengakuan terbuka jika terafiliasi dengan partai politik tertentu, agar masyarakat mendapatkan literasi mengenai potensi bias informasi.
3. Publik perlu meningkatkan literasi media digital agar mampu mengidentifikasi pola *framing* pada media yang berafiliasi politik dan mencari sumber informasi alternatif dari media komunitas atau independen yang lebih otonom.

5.2.2. Saran Akademis

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu outlet media milik konglomerasi besar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sudut pandang pembandingan antara media arus utama (*mainstream*) dengan media alternatif atau berbasis komunitas dalam meliput isu gerakan sosial yang sama
2. Kelemahan penelitian ini adalah keterbatasan dalam mengungkap instruksi internal yang bersifat rahasia di ruang redaksi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dianjurkan menggunakan metode yang lebih mendalam untuk mengamati secara langsung bagaimana interaksi harian antara agensi jurnalis dan tekanan struktur pemilik modal terjadi.